

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Oleh: Muhammad Fakhry Ghafur

Resensi Buku:

Judul Buku : Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer
Penulis : Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs.H. Amin Husein Nasution, M.A.
Penerbit : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Tebal : x + 346 hlm.

Abstract

The History of Islamic Political Thought can be divided into three periods. The Classical period took place from Muhammad era until 1250 M, characterized by the rule of Khalifah as public servant. The Middle period existed until 1800 where Khilafah was camouflage for the real kingdom and descendants of Quraisy. Last, The Modern Period let the western values to including modern political theory. The article is to review the topic in the book especially the issue of periodization.

Pendahuluan

Pembicaraan tentang politik Islam merupakan topik yang penting dalam khazanah pemikiran Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam merupakan agama yang paling kaya dalam pemikiran politik. Pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah etika politik, filsafat politik, hukum hingga tata negara. Keragaman khazanah pemikiran politik Islam bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Hubungan keduanya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Berawal dari sebuah komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah, yang diyakini tidak hanya komunitas agama saja, tetapi juga komunitas politik. Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan semua suku yang berseteru dalam satu wadah, yaitu komunitas Islam. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad telah berhasil membentuk Negara Madinah. Komunitas inilah yang disebut oleh pemikiran Islam sebagai bentuk dari negara ideal. Namun, pasca-Khulafaurrasyidin perkembangan politik Islam mengalami pasang-surut.

Pada abad pertengahan para pemikir muslim seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali menawarkan alternatif sistem politik Islam yang seimbang. Masa ini diwarnai kondisi politik yang mapan, lalu mengalami kelemahan akibat serangan bangsa Mongol. Kemudian muncul kerajaan besar di dunia Islam, seperti Turki Utsmani, Mughal di India, dan Safawi di Iran. Para pemikir masa ini masih berkuat seputar otoritas suku Quraisy sebagai pemegang khalifah universal. Lalu pada masa modern, terjadi perubahan terhadap pemikiran politik Islam, ketika gagasan-gagasan Barat mulai masuk ke dunia Islam seiring dengan penjajahan yang dilakukan Barat. Maka muncullah wacana tentang demokrasi, parlemen, dan pembatasan kekuasaan kepala negara. Dalam merespons gagasan Barat tersebut para pemikir terbagi dalam beberapa paradigma pemikiran, kelompok yang mengintegrasikan hubungan agama dan politik, memisahkan, kedua varian tersebut atau memandang adanya hubungan yang seimbang. Walaupun tidak semua tokoh disebutkan, namun pemikiran dan gagasan politik Islam pada masa modern dapat memberikan gambaran akan dinamika politik Islam yang terjadi saat itu, hingga berpengaruh pada peta politik Islam Indonesia kontemporer.

Pemikiran Politik Islam Abad Klasik (622–1250 M) dan Pertengahan (1250–1800 M)

Pemikiran politik Islam abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M. Setelah Rasulullah wafat kendali pemerintahan dipegang oleh *Khulafaurrasyidin*. Masa ini berlanjut sampai munculnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250M.

Adapun karakteristik yang paling menonjol dalam pemikiran politik Islam pada abad klasik dan pertengahan adalah sistem khalifah, dengan kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, karena ketaatan kepada Khalifah merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keadaan negara itu sendiri sehingga negara senantiasa dalam keadaan aman dan penegakan hukum berjalan dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu sistem politik Islam mengalami perkembangan. Pada masa *Khulafaurrasyidin* pasca wafatnya Rasulullah, kepala negara adalah sebagai *Khadimul Ummah* (pelayan umat) yang lebih mengutamakan kepentingan umat, tidak diangkat berdasarkan garis keturunan. Pasca *Khulafaurrasyidin*, makna Khalifah berubah menjadi *Zillullah fil Ardh* (bayang-bayang Allah di muka bumi) yang diangkat secara turun-temurun. Konsep tersebut muncul ketika Abu Ja'far al-Manshur salah seorang pendiri Dinasti Bani Abbasiyah berhasil menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah. Konsekuensi dari perubahan konsep tersebut adalah kekuasaan dipandang suci dan mutlak yang harus ditaati oleh seluruh rakyat karena kekuasaan merupakan mandat dari Tuhan dan bukan merupakan hasil pilihan rakyat.

Perubahan konsep Khilafah juga tidak terlepas dari pengaruh interaksi dunia Islam dengan praktik politik asing yang berkembang saat itu. Seperti diketahui, bahwa pada masa itu kekuasaan Islam sudah keluar Jazirah Arab melalui penaklukan-penaklukan wilayah. Dari sinilah umat Islam melakukan interaksi secara sosial, politik, dan budaya dengan masyarakat-

masyarakat asing. Konsep politik di luar Islam pada masa itu adalah bahwa kekuasaan kaisar merupakan titisan Tuhan. Konsep “titisan Tuhan” tersebut kemudian diadopsi oleh Abu Ja'far al-Mansur dan dijustifikasi oleh para pemikir Islam abad klasik dan pertengahan. Konsep kepatuhan mutlak kepada kepala negara yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan, mengakibatkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah serta berdampak pada kekacauan sistem penyelenggaraan pemerintah. Bahkan di kalangan pemikir politik Suni tidak membenarkan adanya gerakan oposisi terhadap pemerintah yang tengah berkuasa, apalagi pemberontakan meskipun pemerintahan bersikap korup dan diskriminatif terhadap rakyat. Alasan mereka melarang campur tangan rakyat terhadap pemerintah adalah bahwa menghindari kekacauan yang lebih besar harus diutamakan. Pemikiran politik Abu Ja'far juga ditandai oleh legitimasi suku Quraisy sebagai pihak yang berhak untuk memegang kekuasaan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemimpin politik umat Islam harus berasal dari kalangan suku Quraisy. Akan tetapi, pada abad pertengahan konsep semacam ini diinterpretasi ulang oleh para pemikir Islam, seperti: Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Khaldun. Dalam pandangan Al-Farabi, kepala negara harus berasal dari golongan kelas atas. Pemikirannya tersebut tidak terlepas dari pengaruh filsafat Yunani kuno, terutama pemikiran Plato.¹

Sebaliknya, menurut Al-Mawardi, kepala negara harus seorang yang mempunyai kredibilitas dalam bernegara dan agama. *Hujjatul Islam* Al-Ghazali mendefinisikan kepala negara sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi dan jabatan kepala negara adalah sesuatu yang sangat suci. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala negara merupakan sesuatu yang urgen. Adapun menurut Ibnu Khaldun adanya kepala negara merupakan bentuk keefektifan dalam pelaksanaan syariat Islam. Perbedaan pemikiran tersebut tidak terlepas dari realitas historis dan *setting* sosial politik umat Islam serta kecenderungan dan peran para pemikir pada masanya.

¹ Mohammad Hatta, *Alam Pemikiran Yunani*, (Jakarta: Tintamas, 1980), hlm. 111.

Pemikiran Politik Islam Modern

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan Barat. Dalam internal umat Islam sendiri, terdapat berbagai macam permasalahan berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya Hegemoni Barat. Umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan Barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat.²

Pada saat inilah dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat, padahal sebelumnya kaum muslimin mendominasi percaturan politik dunia selama berabad-abad, mulai dari Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661–750 M), Bani Abbasiyah di Baghdad (750–1258 M), Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol (756–1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501–1736 M), Mughal di India (1526–1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Utsmani (1300–1924 M).³

Namun, setelah kekalahan Turki Utsmani rasa percaya diri Barat semakin tinggi, terutama setelah kebangkitan Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mereka mampu menjajah berbagai belahan dunia. Menghadapi penetrasi Barat ini sebagian pemikir Muslim ada yang bersikap apriori dan anti-Barat dan ada juga yang menerima mentah-mentah pemikiran Barat serta ada pula yang mencari nilai-nilai positif yang datang dari Barat, selain membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.⁴ Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran politik Barat ke dunia Islam, Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam* berusaha

untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada tiga arus pemikiran.

Kelompok pertama, mengembangkan gagasan kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam dan menolak pengaruh pemikiran Barat. Di antara para pemikir abad ini, antara lain: Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, Al-Maududi, dan Sayyid Quthb. Bagi mereka Islam adalah agama terbaik dan meniru Barat adalah suatu kesalahan. Rasyid Ridha masih merindukan kebangkitan kekhalifahan Islam, seperti juga Sayyid Quthb yang menginginkan terbentuknya negara supranasional yang melepas batas-batas geografis. Sementara itu, Maududi menganggap sistem politik demokrasi sebagai sistem musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok kedua, berusaha untuk memisahkan Islam dan politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Urusan politik harus diatur dalam kerangka sekular. Kelompok ini mengharuskan pemikir-pemikir Islam terlibat dalam topik sekularisme, sebagai bagian dari upaya merekonsiliasi nilai-nilai agama mereka dalam bentuk pemerintahan yang sekuler. Sebagai contoh yang terjadi di Iran era Reza Pahlevi yang digulingkan pada tahun 1979. Pahlevi memerintahkan pasukannya ke jalan-jalan untuk membuka jilbab-jilbab dan melarang perempuan di pemerintahan menggunakan jilbab.⁵ Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abdurrazik dan Thaha Husein. Ali Abdurrazik dan Thaha Husein lebih banyak berbicara pada tataran pemikiran. Raziq menolak khilafah sebagai bentuk ideal pemerintahan Islam. Thaha Husein menganjurkan adopsi mentah-mentah pemikiran politik Barat. Kemal Ataturk lebih jauh lagi, dia menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah negara Turki Modern yang sekuler. Hal-hal yang berbau agama tidak boleh dimasukkan dalam tataran politik praktis. Agama adalah urusan personal yang tidak diatur oleh negara.⁶

Kelompok ketiga, berusaha untuk menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 94.

³ As-Suyuthi, *Ensiklopedi Pemimpin Islam*, (Jakarta: Hikmah Mizan, 2009).

⁴ Afif Muhammad, *Islam Mazhab Masa Depan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000).

⁵ Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 68.

⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

di atas. Mereka tidak menolak pemikiran yang berasal dari Barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Adapun tokoh-tokohnya antara lain: Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Mahmud Syaltut. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisme, namun di dalamnya disertakan nilai-nilai religius. Mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan Khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kelompok ini berusaha untuk merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman, seperti pentingnya syura (musyawarah), namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran berkembang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut kelompok ini Islam memberikan seperangkat nilai-nilai yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umatnya.⁷

Ketiga arus pemikiran ini, dalam berbagai variasinya tetap terlihat dalam perkembangan pemikiran politik Islam sekarang. Masing-masing arus pemikiran tersebut memiliki argumentasi-argumentasinya tersendiri.

Dinamika Politik Islam di Indonesia

Hubungan antara Islam dan Politik di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Hal tersebut ditandai dengan awal masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 M.⁸ Islam juga mempunyai peranan penting dalam kerajaan-kerajaan Nusantara, dalam hal ini ulama menjadi aktor penting di dalam kerajaan dan menjadi alat justifikasi sultan sehingga Islam mampu menanamkan pengaruhnya dalam sejarah Indonesia.⁹

Ketika Belanda masuk ke Indonesia, pergerakan-pergerakan Islam, baik yang bersifat lokal tradisional maupun nasional modernis menjadi

motor perlawanan terhadap penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam bukunya Dr. Muhammad Iqbal membagi sejarah pemikiran politik Islam Indonesia ke dalam lima periode, yaitu periode menjelang kemerdekaan, periode demokrasi liberal yang berakhir hingga 1959, periode demokrasi terpimpin yang berakhir sejalan dengan kegagalan pemberontakan G-30 S/PKI 1965 serta periode Orba yang berakhir pada 1998 yang dilanjutkan dengan era reformasi.¹⁰

Politik Islam Era Penjajahan Belanda

Setelah runtuhnya satu per satu kerajaan Islam, kepulauan Nusantara berada di bawah kekuasaan Belanda. Waktu itu, Belanda belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran dan sistem sosial Islam. Pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar tidak mengganggu urusan agama kaum muslimin. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Belanda cenderung memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan hukum Islam. Namun, setelah kedatangan Snouck Hurgronje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijakan tentang Islam di Indonesia karena Snouck mempunyai pengalaman penelitian di Arab, Jawa, dan Aceh. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut cenderung merugikan umat Islam, hingga memunculkan perlawanan di kalangan umat Islam. Para ulama lagi-lagi memiliki peranan penting sebagai motor gerakan perlawanan terhadap penjajah.

Sejak saat itu terjadi pergolakan di beberapa daerah. Di Aceh, Cut Nyak Dien dan Teuku Umar yang merupakan tokoh spiritual masyarakat Aceh berperang melawan Belanda. Di Minangkabau terjadi Perang Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa berkobar perlawanan melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, sedangkan di Kalimantan terjadi perlawanan yang sengit di bawah komando Pangeran Antasari. Begitu juga di daerah-daerah lainnya.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm.1–2.

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 25.

⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

¹⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Di tengah perlawanan tersebut muncul kondisi yang tidak menguntungkan bagi umat Islam. Dalam menghadapi perlawanan umat Islam, Belanda merangkul kaum adat yang pada dasarnya beragama Islam. Dari sinilah asal mula munculnya pertentangan antara kelompok nasionalis agama dan nasionalis netral agama. Pertentangan tersebut mewarnai dinamika politik di Indonesia menjelang masa kemerdekaan.

Politik Islam Indonesia Menjelang Kemerdekaan

Pada periode awal abad ke-20 Islam menjelma menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan oleh kolonial Belanda. Pada periode ini mulai muncul organisasi-organisasi Islam, baik yang bergerak dalam bidang politik maupun sosial keagamaan. Di antara organisasi yang muncul pada masa ini, antara lain: Sarekat Islam (1912) yang semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1920), Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1930), Persatuan Muslimin Indonesia (1930), dan Partai Islam Indonesia (1938). Menurut Noer Iskandar Albarsany, pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut memiliki watak kultural dan belum mewakili ideologis politik. Pemikiran ideologis politik baru muncul kemudian setelah berbagai komponen bangsa ini mendirikan organisasi-organisasi politik sekitar tahun 1930. Munculnya MIAI, GAPI, dan yang lainnya dalam Majelis Rakyat Indonesia (MRI), telah memunculkan ide-ide masa depan Indonesia.¹¹

Ketika Jepang menjajah (1942–1945), pendekatan yang dilakukan pertama kali adalah dengan mencari simpati dari kaum muslimin yang mempunyai peran signifikan di Nusantara. Jepang pun menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan umat Islam. Di antara keberpihakan Jepang yang mengakomodasi kepentingan umat Islam adalah pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada 5 September 1942, yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada akhir tahun 1943. Jepang juga membentuk Shumubu (Kantor Urusan Agama) bagi kepentingan umat Islam.

Jepang juga memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan Islam seperti Hizbullah dengan memberikan latihan perang. Para pemuda dan ulama banyak yang direkrut dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang.

Pada saat kekuatan Jepang melemah akibat kalah perang dalam melawan sekutu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertujuan untuk merumuskan masalah dasar negara, hubungan antara kepala negara, kabinet, dan parlemen.¹² Di BPUPKI inilah perdebatan ideologis antara para pengusung Islam sebagai dasar negara dan nasional sekuler berlangsung serta kelompok kebudayaan Jawa yang berasal dari Jawa Tengah. Di antara tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam, antara lain: K.H.A. Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansyur, K.H.A. Wachid Hasjim, Sukiman Wirjosandjodjo, dan Haji Agus Salim. Adapun tokoh-tokoh pendukung nasionalis sekuler, antara lain: Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat, Ahmad Subardjo, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Wongsonegoro.

Akhirnya melalui Tim Sembilan ditetapkanlah piagam Jakarta yang pada sila pertamanya berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kesepakatan ini dicapai pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan setelah adanya keberatan dari pihak Kristen. Meskipun pada awalnya syariat Islam sempat menjadi acuan dalam kehidupan bernegara, umat Islam harus mau mengorbankan keinginan mereka dan menerima rumusan lain, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Politik Islam Era Demokrasi Liberal

Setelah membahas tentang politik Islam pada masa Kemerdekaan dengan mengalahkannya umat Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi. Dalam pembahasan selanjutnya Dr. Muhammad Iqbal berusaha untuk menelusuri peran umat Islam di era demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya maklumat X Bung Hatta pada tahun 1945, yang berisi tentang

¹¹ Noer Iskandar Albarsany dalam http://swaramuslim.net/islam/more.php?id=A761_0_4_0_M.

¹² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 30.

diberikannya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik dan menyalurkan aspirasi politiknya. Tokoh-tokoh Islam-pun mengharapkan agar pemilu dapat dilaksanakan secepatnya. Namun, berhubung kondisi politik Indonesia yang belum stabil dan masih diliputi banyak pergolakan, pemilu belum bisa langsung dilaksanakan walaupun telah ada maklumat Bung Hatta tersebut. Barulah pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan. Dari pemilu ini terdapat tiga ideologi yang memperoleh suara terbesar. Ketiga kelompok tersebut adalah Islam, nasionalis dan komunis. Dari perolehan hasil kursi maka terdapat kekuatan partai besar ketika itu, yaitu PNS, Masyumi, NU, dan PKI. Meskipun partai-partai Islam bersaing dalam memperebutkan pengaruh, mereka tetap memiliki suara bulat untuk memperjuangkan Islam. Juru bicara yang terpenting dalam perjuangan menegakkan Islam sebagai dasar negara adalah Mohammad Natsir. Selain Natsir ada pula tokoh lain, seperti Saifuddin Zuhri, Zainal Abidin Ahmad, Osman Raliby, Syukri Ghazali, T.M. Hasbi Asy-Shidieqy, Buya Hamka, K.H. Masykur, dan Kasman Singodimedjo. Bagi mereka Pancasila yang dipakai sebagai dasar negara adalah netral dan tidak bermuatan moral religius.

Sebaliknya, pihak pendukung Pancasila tidak kalah gencarnya mempertahankan pendirian mereka. Tokoh-tokohnya antara lain Ruslan Abdulgani, Sutan Takdir Alisjahbana, Arnold Mononutu, Soedjatmoko, dan Suwirjo. Mereka menolak pendapat kalangan Islam yang menyatakan bahwa Pancasila berhaluan sekuler.¹³ Di tengah pergolakan tersebut akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. Lewat dekrit ini Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan Indonesia kembali kepada UUD 1945. Dengan keluarnya dekrit tersebut kelompok Islam kembali mengalah dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Politik Islam Era Demokrasi Terpimpin

Dengan dikeluarkannya dekrit oleh Soekarno menandai era baru dalam peta politik Indonesia yang dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa tersulit bagi umat Islam

untuk bisa memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Soekarno yang terobsesi untuk menjadi penguasa mutlak membubarkan partai Masyumi dan memberlakukan demokrasi terpimpin. Partai Masyumi dibubarkan karena dianggap telah menentang revolusi yang dianggap Soekarno belum selesai. Soekarno juga menuduh bahwa Masyumi adalah penyebab lahirnya gerakan separatis di beberapa daerah, yang berujung pada penangkapan sebagian besar tokoh-tokohnya. Sebaliknya, tiga partai Islam lainnya, yakni NU, PSII, dan Perti berusaha untuk menyesuaikan diri dengan politik demokrasi terpimpin ala Soekarno.

Politik Islam Era Orde Baru

Era ini ditandai dengan kegagalan pemberontakan G-30-S/PKI dan runtuhnya kekuasaan presiden Soekarno serta pemberian mandat kepada Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada awalnya, Orde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan harapan bagi umat Islam. Kehadiran Orba merupakan “lampu hijau”, untuk menampilkan kembali Masyumi sebagai wadah perjuangan menegakkan Islam. Maka sejalan dengan dinamika politik Orba, umat Islam berusaha untuk menyusun kembali kekuatannya dalam memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara. Namun, rencana mereka mendapatkan hambatan, ketika pemerintah Soeharto yang didukung militer tidak mengizinkan berdirinya kembali Masyumi. Kelompok militer menganggap tokoh-tokoh Masyumi mempunyai kesalahan yang besar karena ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI. Selain itu, ada juga sebagian komponen kelompok Islam yang bermaksud untuk mendirikan partai Islam baru, seperti Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), namun karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari umat Islam akhirnya pemerintah Soeharto tidak memberikan izin berdirinya PDII.

Pada tanggal 20 Februari 1968, pemerintah Soeharto mengizinkan berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun, karena tidak berdasarkan suara dari bawah, Parmusi tidak berdaya dan terus-menerus dirundung konflik serta berada dalam bayang-bayang Orba. Selain Parmusi masih banyak lagi partai-partai

¹³ Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti Press, 1987).

Islam, seperti Partai NU, Partai Syarikat Islam, dan Perti. Pada tahun 1971, pemerintah Orba melaksanakan pemilu pertamanya yang diikuti Kelompok Islam yang diwakili oleh Parmusi, NU PSII, dan Perti serta Kekuatan Nasionalis Kristen yang diwakili oleh PNI, IPKI, dan Parkindo, Partai Murba. Sementara itu, kekuatan pemerintah diwakili oleh Partai Golkar. Pada pemilu ini, Golkar mendapatkan suara terbanyak dengan mengantongi 62,11%. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah Orba akhirnya menetapkan kebijakan penyederhanaan partai. Partai-partai yang berbasis Islam bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai yang berbasis nasionalis bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Pada masa ini, pemerintah Orba sangat berhati-hati dan bertindak tegas terhadap hal-hal yang menggoyahkan kekuasaannya.

Fenomena menarik lainnya pada awal 1990-an, adalah pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah pimpinan B.J. Habibie. Keberadaan ICMI mewarnai dinamika politik era Orde Baru. Pada masa Orba, perkembangan politik Islam tidak dapat terealisasi secara luas. Dalam hal ini kalangan cendekiawan Islam berusaha menghilangkan stigma radikalisme politik Islam yang diciptakan selama masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Strategi ini pun dinilai berhasil dengan terjalinnya hubungan “mesra” antara umat Islam dan pemerintah Orba. Pemerintah Soeharto dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam, walaupun tidak dapat memberikan ruang yang luas dalam politik Indonesia.

Politik Islam Era Reformasi

Dalam bukunya Dr. Muhammad Iqbal mencoba untuk membahas tentang dinamika politik Islam pasca Orba, yaitu era reformasi yang ditandai dengan keruntuhan rezim Orba. Setelah lengsernya Soeharto, presiden pengganti B.J. Habibie berusaha untuk mempercepat pelaksanaan pemilu dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mendirikan partai politik. Antusiasme masyarakat pun dalam mendirikan partai sangat besar sekali. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah

tersebut mengerucut menjadi 48 partai yang disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing partai memiliki visi, misi, dan *platform* serta ciri khasnya masing-masing. Dari ke-48 partai tersebut sebagian menganut asas Pancasila dan sebagian lain berasas Islam serta ada yang berasaskan demokrasi religius. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kalangan umat Islam untuk mendirikan partai-partai Islam. Terbukti dari 48 partai peserta pemilu 1999, terdapat 16 peserta dari partai Islam atau partai yang berbasis massa umat Islam. Dengan jumlah yang besar tersebut partai-partai Islam berusaha untuk mendulang suara sebesar-besarnya. Namun, jumlah partai Islam yang banyak tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan aspirasi umat terpecah belah ke dalam beberapa partai. Sehingga pada pemilu 1999 tersebut, partai-partai Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Perolehan suara partai-partai Islam tidak begitu besar. PBB memperoleh 13 kursi, PK 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika proses pemilihan Presiden di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam poros tengah yang digalang oleh Amien Rais untuk menggalakan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi perseteruan antara kubu Golkar yang mengusung Habibie dengan PDI-P yang mengusung Megawati. Amien Rais bersama-sama partai Islam lainnya, dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama pada masa era reformasi. Sementara itu, dalam pemilihan wakil presiden, Megawati berhasil memperoleh suara terbanyak dengan mengalahkan pesaingnya Hamzah Haz. Duet Wahid-Mega ini bisa dianggap sebagai rekonsiliasi antara Islam moderat dengan kubu nasionalis. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati, diselenggarakan pemilu yang melibatkan 24 partai politik. Dari 24 partai politik tersebut terdapat lima partai Islam, yaitu PPP, PBB, PKS, PBR, PPNU, di samping PAN yang memiliki basis massa Muhammadiyah serta PKB yang didukung NU. Pada masa ini juga dilangsungkan pemilu secara

langsung yang memunculkan lima pasangan calon presiden dan wakilnya. Antara lain SBY-Jusuf Kalla, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahudin Wahid, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pemilu tersebut berlangsung dua putaran, dengan putaran pertama terdapat dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasyim. Selanjutnya, pada putaran kedua SBY-Kalla dapat memenangi pertarungan menuju kursi presiden dan wakil presiden. Dalam putaran kedua ini banyak partai Islam yang merapat ke kubu SBY-Kalla. Pada pemilu tahun 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono kembali memenangi pertarungan perebutan kursi presiden dengan mengalahkan Mega-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Demikian uraian singkat seputar dinamika politik Islam Indonesia sebagaimana yang diutarakan secara lebih lengkap oleh Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam*. Buku tersebut memberikan informasi yang luas kepada kita tentang perkembangan pemikiran politik Islam dari masa ke masa. Namun, dalam bukunya tersebut Dr. Muhammad Iqbal tidak secara detail menggambarkan tentang pemikiran para tokoh Islam Indonesia, tetapi lebih banyak membahas sejarah perkembangan politik Islam serta partisipasi politik kaum muslimin di Indonesia. Dalam bukunya Dr. Muhammad Iqbal juga tidak mengkaji lebih dalam pola negara Madinah yang

dibangun Nabi Muhammad saw. pada abad klasik sebagai titik tolak peradaban Islam.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan).
- Albarsany, Iskandar, Noer. http://swaramuslim.net/islam/more.php?id=A761_0_4_M
- As-Suyuthi. 2009. *Ensiklopedi Pemimpin Islam*. Jakarta: Hikmah Mizan.
- Effendy, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholis. 1987. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Muhammad, Afif. 2000. *Islam Mazhab Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.